

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.P. 2009, *Perlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Cv Mandar Maju.
- Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 1.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, jakarta: Sinar Grafika.
- Ilham Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan, Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, Redaksi Sinar Grafika, 2005, *Seri Perpajakan PBB*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Sadono Sukirno, 1985, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI dan Bima Grafika.

Satjipto Raharjo. 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.

-----, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

-----, 2021, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Press.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Siswanto, Sunarno. 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta" Sinar Grafika.

B. Tesis

Gamma Alim Wicaksono, 2024, *"Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Resor Kota Pati."* Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

C. Jurnal

Erni, 2021, Analisis Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.1.

Luthvi Febryka Nola, 2016, *"Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)"*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 7, No. 1.

Mamonto, M. A. W. W., Ramadani, R., & Buana, A. P., 2022, Dimensi Hak Konstitusional Sebagai Peningkatan Sadar Konstitusi

Kepada Aparatur Desa Kapita. AL-TAFANI Jurnal Pengabdian, Vol. 2 No, 1.

Muhammad Indra Jaya, M. Said Karim and Syamsuddin Muchtar, 2024, "Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara," *Al-Mizan (E-Journal)*, Vol. 21 N0. 1, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Sultam Amai Gorontalo.

Yusrivadi, 2004, *Paradigma Positivistik dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. XIV

D. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PPAT.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

E. Sumber Internet

KPK. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Annoucement untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel.*

<https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>,

diakses pada Kamis, tanggal 8 Januari 2025, pukul 10.05 Wita

HUKUM ONLINE COM, *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya,*

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769>, diakses

Kemenkeu Learning Center. *Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Setiap Bulan*

[https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-perhitungan-pajak-penghasilan-pph-pasal-21-pegawai-tetap-setiap-](https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-perhitungan-pajak-penghasilan-pph-pasal-21-pegawai-tetap-setiap-bulan/detail/)

[bulan/detail/](https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-perhitungan-pajak-penghasilan-pph-pasal-21-pegawai-tetap-setiap-bulan/detail/) diakses pada Senin, tanggal 14 Oktober 2024, pukul 11.15 Wita

Pragas Gadatama, *Penecgahan Kejahatan (Crime Prevention),*

<https://pragas.co.id/pencegahan-kejahatan-crime-prevention-2/>,

diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 15:15 WITA.

Wawancara:

Wawancara dengan Dr. M. Khalid Ali, S.H., M.H, selaku Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Makassar, pada Tanggal 10 Januari 2025.

Wawancara dengan Yoel Rante, S.H, M.H., M.H, selaku Penyidik Polrestabes Makassar, pada Tanggal 15 Januari 2025.